

KESIAPAN PROGRAM FORMULASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2018-2024 DESA DERMAJI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

Shadu Satwika Wijaya^{1*}

¹Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman

*shadu.satwika@unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk, mendeskripsikan dan mengidentifikasi program apa yang disiapkan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan distribusi frekwensi dan klasifikasi untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi kebijakan yang diformulasikan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik kluster sampling dipadukan dengan kuota sampling. Hasil penelitian adalah. Kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan yang diformulasikan dalam RPJM Desa Dermaji Tahun 2018-2024 cenderung kurang siap. Hal ini terjadi karena dari ketiga dimensi yaitu; dimensi ekonomi, dimensi ekologi/ lingkungan dan dimensi sosial hanya dimensi ekonomi yang yang cenderung siap. Dua dimensi yaitu dimensi lingkungan dan sosial cenderung kurang siap.

Kata Kunci: formulasi, kapasitas aktor, Kesiapan program.

Abstract

This study aims to describe and identify what programs are provided to deal with development problems in the RPJMDes of Dermaji Village, Lumbir District, Banyumas Regency in the year 2018-2024. This study uses a quantitative descriptive approach using frequency distribution and classification to describe and identify the policies enacted. The sampling technique in this study is a cluster sampling technique combined with quota sampling. The results of the study are. The preparedness of programs to deal with development problems enacted in the RPJM Desa Dermaji 2018-2024 tends to be less prepared. This happens because of three dimensions namely; the economic dimension, the ecological/environmental dimension and the social dimension, only the economic dimension tends to be prepared. Two dimensions, namely the environmental and social dimensions, tend to be less prepared.

Keywords: formulation, actor capacity, program readiness.

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur melalui Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan daerah untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya (Hisyam, 2015). Semangat perubahan Otonomi Daerah ini kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang memberikan kewenangan terhadap desa dalam membuat arah kebijakan pembangunannya (Otonomi Desa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai organisasi pemerintahan yang terendah, desa diberi kewenangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya dan mengelola keuangannya sendiri, dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahap pengawasan dengan melibatkan seluruh komponen

masyarakat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, Organisasi Masyarakat dan kelompok lainnya (Dewanta, 2004; Yudarta & Winaya, 2018). Undang-Undang No 6 Tahun 2014 memberi hak otonom kepada pemerintahan desa untuk mengelola dan melaksanakan tugas pembangunan desa melalui kebijakan pengalokasian anggaran APBN untuk desa. Pengalokasian dana terhadap desa untuk dikelola langsung oleh desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kebijakan pembangunan desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk fisik dan non fisik. (Hulu et al., 2018). Alokasi APBN untuk desa yang secara signifikan jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017 alokasi dana desa sudah mencapai RP 60 triliun atau 800,4 juta/desa dengan serapan anggaran mencapai 89,20%.

Alokasi dana desa yang terus meningkat sangat bermanfaat bagi pembangunan desa sehingga dapat membawa perubahan terhadap status 75.436 desa di Indonesia. Perubahan tersebut yaitu dari status desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, kemudian dari desa berkembang berubah menjadi desa maju dan selanjutnya dari desa maju menjadi desa yang mandiri. Untuk mengetahui status desa tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 poin (8) Tentang Indeks Desa Membangun disebutkan bahwa status desa dapat diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu: 1) Indeks Ketahanan Sosial; 2) Indeks Ketahanan Ekonomi; 2) Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan. Perangkat indikator dalam IDM diperlukan utk menjaga kesinambungan pembangunan yang lebih mengutamakan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (ekologi) agar menjadi kekuatan yang bersinergi, serta menjaga potensi dan kemampuan desa guna terciptanya kesejahteraan desa (Suparmoko, 2020). Kesejahteraan desa tersebut dapat dicapai melalui kebijakan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang adil dan merata yang didasarkan pada kearifan lokal serta ramah lingkungan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam secara baik dan berkesinambungan sebagai dimensi yang memperkuat upaya pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Suparmoko, 2020).

Kabupaten Banyumas sebagai salah satu kabupaten terbesar di Jawa Tengah masuk kategori kabupaten berkembang. Kabupaten Banyumas terbagi dalam 27 wilayah kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 301 desa. Dari 301 desa tersebut terdapat 191 (63,4%) desa berstatus masih belum maju. Berdasarkan data IDM tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dengan rincian: 5 desa berstatus desa mandiri, 105 desa maju dan 191 desa berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Banyumas tidak lagi terdapat desa dengan status desa tertinggal. Namun yang menjadi menarik, dalam data tersebut terdapat desa berprestasi yang sering memperoleh penghargaan dalam capaian program pembangunan berada pada urutan 30 terbawah dari keseluruhan jumlah desa yang ada di Kabupaten Banyumas. Desa tersebut adalah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir. Data IDM 2020 tingkat Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa Desa Dermaji menempati posisi 271 dari 301 desa di Kabupaten Banyumas. Kemudian melihat data IDM ditingkat Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Desa Dermaji menempati urutan ke 8 dari 10 desa dalam wilayah tersebut.

Melihat data di atas menunjukkan bahwa Desa Dermaji merupakan salah satu desa dengan nilai IDM yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan data Indeks Desa Membangun, baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan membuktikan bahwa capaian pembangunan di Desa Dermaji belum efektif dan optimal. Agar Dermaji terus berkembang menjadi desa maju dan mandiri, tentunya harus dapat menyediakan program untuk mengatasi masalah pembangunan

tersebut melalui kebijakan pembangunan desa yang strategis. Untuk menghasilkan rencana-rencana kebijakan pembangunan yang baik, tentunya tidak bisa dilepaskan dari proses formulasi kebijakan pembangunan desa.

Formulasi kebijakan pembangunan adalah rangkaian proses keseluruhan tahapan di dalam menyusun kebijakan yang meliputi proses: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban (Hai, 2016). Proses formulasi kebijakan pembangunan merupakan upaya dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan, maka dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terukur dan terarah agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan dengan adil dan merata disegala bidang serta dapat diterima oleh seluruh kalangan. Dalam proses formulasi kebijakan harus mampu mengidentifikasi tujuan dari kebijakan itu sendiri, kebijakan yang dibuat harus dapat diterima oleh semua pihak dan harus mampu menjadi sarana dalam mengurangi masalah publik (Sutikno et al., 2020).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kebijakan menurut Anderson, (2003), kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah. Kebijakan merupakan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, Anderson memandang kebijakan adalah memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga secara tegas membedakan antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang diartikan sebagai pemilihan diantara berbagai alternatif. Menurut Dye (1978), kebijakan merupakan keputusan yang diambil atau tidak diambil dan atau dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. "*To do or not to do*" sedangkan menurut Friedrich. Kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Konsep kebijakan pembangunan, secara etimologi, konsep pembangunan meliputi anatomik (bentuk), fisiologi (kehidupan), behavioral (perilaku), (Rosana, 2018). Pembangunan merupakan upaya perubahan menuju peningkatan kehidupan yang lebih baik. Tanpa adanya pembangunan, suatu negara atau daerah tidak dapat mensejahterakan masyarakat (Handoyo, 2016). Perencanaan kebijakan pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi masyarakat menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, material-spiritual menuju kondisi yang lebih baik (Rosana, 2018). Sementara pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pola kebijaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangannya. Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, Lonergan menegaskan bahwa terdapat tiga (3) dimensi penting yang harus menjadi pertimbangan. Ketiga dimensi tersebut adalah: 1) dimensi ekonomi yang menghubungkan antara pengaruh-pengaruh unsur makroekonomi dan mikroekonomi pada lingkungan dan bagaimana sumberdaya alam diperlakukan dalam analisis ekonomi; 2) dimensi politik yang mencakup proses politik yang menentukan penampilan dan sosok pembangunan, pertumbuhan penduduk,

dan degradasi lingkungan pada semua negara. Dimensi ini juga termasuk peranan agen masyarakat dan struktur sosial dan pengaruhnya terhadap lingkungan; 3) dimensi Sosial Budaya yang mengaitkan antara tradisi atau sejarah dengan dominasi ilmu pengetahuan barat, serta pola pemikiran dan tradisi agama. Ketiga dimensi ini berintegrasi satu sama lain untuk mendorong terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan (Rosana, 2018).

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan: Kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dipilih atau tidak dipilih dan sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah yang mengandung unsur keputusan berupa pilihan diantara alternatif-alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu sebagai upaya memecahkan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sarana dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan melakukan suatu tindakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hubungan konsep kebijakan publik dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, akan meneliti terkait ketersediaan kebijakan program pembangunan apa yang dipilih dan diputuskan oleh Pemerintah Desa Dermaji untuk memecahkan permasalahan pembangunan di Desa Dermaji dalam kurun waktu tertentu yang diformulasikan dalam Rencana Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Desa Dermaji. Untuk menjawab pertanyaan pada penelitian yang akan dilakukan maka diperlukan sebuah hipotesis sebagai berikut: Kurang siapnya program untuk mengatasi permasalahan pembangunan dalam RPJMDes Desa Dermaji Tahun 2018-2024 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif (Cresswell, 2015). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik kluster sampling dipadukan dengan kuota sampling (Creswell & Creswell, 2018). Analisis data deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan klasifikasi untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa Dermaji Tahun 2018-2024 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dengan bantuan program SPSS *For Windows release 22*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil survei yang dimuat dalam hasil penelitian, diperoleh informasi besaran kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa Dermaji Tahun 2018-2024 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas cenderung kurang siap. Kecenderungan ini dapat ditinjau dari tiga dimensi kesiapan program yaitu (1) dimensi ekonomi yang cenderung tinggi sebesar (2) dimensi lingkungan/ ekologi yang cenderung sedang dan (3) dimensi sosial yang cenderung sedang. Artinya Data tersebut dapat dimaknai bahwa kebijakan yang dipilih dan diformulasikan kedalam RMJMDes belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah pembangunan secara substansial di Desa Dermaji. Kecenderungan kurang siapnya program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa Dermaji Tahun 2018-2024 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dapat terjadi karena, meskipun terdapat dorongan dari program pembangunan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi yang tergolong tinggi, namun belum diikuti oleh program pembangunan dalam meningkatkan ketahanan lingkungan dan ketahanan sosial yang masih belum maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dermaji dalam mengatasi permasalahan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum difokuskan permasalahan yang lebih relevan sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada di Desa Dermaji.

Sebagian besar kebijakan bersifat populis sesuai dengan apa yang diusulkan dan dikehendaki oleh masyarakat, bukan sebagai formula yang dipilih dalam penyelesaian permasalahan yang substansial. Hal ini berkaitan dengan pendapat dari Anderson (1975) bahwa, kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, Anderson memandang kebijakan adalah memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam upaya peningkatan pembangunan di Desa Dermaji saat ini memfokuskan pada pembangunan fisik hal ini dikarenakan untuk menjangkau aksesibilitas dan mobilisasi ekonomi masyarakat karena kondisi daerah dan geografis. Tetapi juga perlu di pahami bahwa dalam upaya pembangunan juga tidak boleh hanya berfokus pada satu aspek, dimana pembangunan kapasitas SDM masyarakat desa juga sangatlah penting agar mampu secara bertahap meningkatkan standar kualitas masyarakat baik dari sisi pendidikan maupun ketrampilan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pembangunan harus mampu mengkolaborasi antara pembangunan fisik dan pembangunan sumberdaya manusia (non fisik) agar dapat menyelesaikan substansi permasalahan pembangunan di desa Dermaji.

Dimensi Ekonomi

Berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada dimensi ekonomi bahwa secara umum tergolong kategori tinggi. Hal ini disebabkan dari kedua sub dimensi pada dimensi ekonomi cenderung tersedia. Dapat dilihat hasil survei kedua sub dimensi tersebut yaitu (1) sub dimensi ketersediaan program layanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang secara umum cenderung tersedia (2) sub dimensi ketersediaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cenderung cukup tersedia. Kecenderungan tersedianya program layanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat ditinjau dari jawaban responden pada tiga indikator yaitu: (a) Indikator ketersediaan program pembangunan kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, mayoritas responden menjawab diformulasikan tetapi belum dilaksanakan (b) Indikator ketersediaan program pembangunan pendidikan desa berkualitas, mayoritas responden menjawab diusulkan, diformulasikan dan dilaksanakan (c) Indikator ketersediaan program pembangunan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan mayoritas responden menjawab diusulkan, diformulasikan dan dilaksanakan.

Selanjutnya kecenderungan cukup tersedianya program pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari jawaban responden pada tiga indikator yaitu: (a) Indikator ketersediaan program pembangunan yang melibatkan perempuan desa mayoritas responden menjawab diformulasikan tetapi belum dilaksanakan (b) Indikator ketersediaan program pemerataan ekonomi desa mayoritas responden menjawab diagendakan tetapi tidak diformulasikan (c) Indikator ketersediaan program kemitraan untuk pembangunan desa mayoritas responden menjawab diusulkan, diformulasikan dan dilaksanakan sebesar menjawab. Meskipun dari sub dimensi ketersediaan program layanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang secara umum cenderung tersedia, namun dari sub dimensi ketersediaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cenderung cukup tersedia. Data indikator kurang tersedianya program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menunjukkan belum terjadi pemerataan antara pembangunan fisik dan non fisik untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dermaji. Hal ini terjadi dikarenakan masih adanya kendala dalam melakukan proses pembangunan. Adanya kendala dalam pelaksanaan pembangunan berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan Setyobakti (2018) yang memberikan gambaran adanya beberapa permasalahan tiap indikator dan potensi untuk menekan atau menyelesaikan atas permasalahan yang ada. Hal senada selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayat dan kawan-

kawan Tahun (2018) yang memberikan gambaran upaya pemerintah desa dalam pembangunan sumber daya manusia, telah membuat kebijakan mengenai kegiatan – kegiatan yang dapat membangun sumber daya manusia yang ada. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut belum mampu memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian masyarakat Desa. Terdapat Faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa.

Dimensi Ekologi/Lingkungan

Berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada dimensi ekologi/lingkungan bahwa secara umum tergolong kategori sedang. Hal ini disebabkan dari kedua sub dimensi pada dimensi ekologi/lingkungan cenderung kurang tersedia. Dapat dilihat hasil survei kedua sub dimensi tersebut yaitu (1) sub dimensi ketersediaan program kelestarian lingkungan yang secara umum cenderung kurang tersedia; (2) sub dimensi ketersediaan program rekayasa lingkungan yang cenderung tidak tersedia. Kecenderungan kurang tersedianya program kelestarian lingkungan tersebut dapat ditinjau dari jawaban responden pada tiga indikator yaitu: (a) Indikator ketersediaan program pembangunan desa berenergi bersih dan terbarukan sebagian besar responden menjawab diusulkan, diformulasikan dan dilaksanakan; (b) Indikator ketersediaan program pembangunan desa berenergi bersih dan terbarukan; (c) Indikator ketersediaan program konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan mayoritas responden menjawab diformulasikan tetapi belum dilaksanakan.

Selanjutnya kecenderungan tidak tersedianya program rekayasa lingkungan dapat ditinjau dari jawaban responden pada tiga indikator yaitu: (a) Indikator ketersediaan program pembangunan desa tanggap perubahan iklim mayoritas responden menjawab diagendakan tetapi tidak diformulasikan; (b) Indikator ketersediaan program pembangunan desa peduli lingkungan laut mayoritas responden menjawab diagendakan tetapi tidak diformulasikan; (c) Indikator ketersediaan program pembangunan desa peduli lingkungan darat mayoritas responden menjawab diagendakan tetapi tidak diformulasikan. Meskipun dari sub dimensi ketersediaan program kelestarian lingkungan yang secara umum cenderung kurang tersedia, namun dari sub dimensi rekayasa lingkungan cenderung tidak tersedia. Data indikator kurang tersedianya program rekayasa lingkungan ini menunjukkan masih kurangnya perhatian terhadap ketahanan lingkungan oleh Pemerintah Desa Dermaji dalam melakukan proses pembangunan. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti & Ulfah Tahun (2022) diperoleh gambaran bahwa potret pembangunan pemerintah di berbagai level masih menunjukkan orientasi yang rendah terhadap aspek ketahanan lingkungan. Masalah lingkungan belum menjadi isu strategis dalam penentuan pembangunan di level desa. Pembangunan belum memperhatikan aspek sustainability dan lingkungan (*green budgeting*). Sehingga masalah lingkungan akan menjadi ancaman besar bagi pembangunan di masa yang akan datang.

Dimensi Sosial

Berdasarkan hasil survei dapat dilihat bahwa secara umum dimensi sosial tergolong kategori sedang. Hal ini disebabkan dari kedua sub dimensi pada dimensi sosial yang cenderung kurang tersedia. Dapat dilihat hasil survei kedua sub dimensi tersebut yaitu (1) Sub dimensi ketersediaan program pengurangan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang secara umum cenderung kurang tersedia; (2) Sub dimensi ketersediaan program lingkungan dinamis yang cenderung kurang tersedia. Kecenderungan kurang tersedianya program pengurangan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) secara umum dapat ditinjau dari jawaban responden pada tiga indikator yaitu: (a) Indikator ketersediaan

program pembangunan desa tanpa kemiskinan mayoritas responden menjawab diusulkan, diformulasikan dan dilaksanakan; (b) Indikator ketersediaan program pembangunan desa tanpa kelaparan sebesar mayoritas responden menjawab diusulkan, diformulasikan dan dilaksanakan; (c) Indikator ketersediaan program pembangunan desa tanpa kesenjangan mayoritas responden menjawab diusulkan, diformulasikan dan dilaksanakan.

Selanjutnya kecenderungan kurang tersedianya program lingkungan dinamis dapat ditinjau dari jawaban responden pada tiga indikator yaitu: (a) Indikator ketersediaan program pembangunan desa sehat dan sejahtera mayoritas responden menjawab diusulkan diformulasikan dan dilaksanakan; (b) Indikator ketersediaan program pembangunan desa damai berkeadilan mayoritas responden menjawab diformulasikan tetapi belum dilaksanakan; (c) Indikator ketersediaan program pembangunan kelembagaan desa dinamis dan berbudaya desa adaptif mayoritas responden menjawab diusulkan, diformulasikan dan dilaksanakan. Kedua sub dimensi pada dimensi sosial yang secara umum cenderung kurang tersedia. Data indikator kurang tersedianya program pengurangan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan lingkungan dinamis ini menunjukkan masih kurangnya perhatian Pemerintah Desa Dermaji dalam melakukan proses pembangunan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astin damayanti (2019) bahwa, ketahanan masyarakat desa dapat dilakukan melalui upaya pembangunan dan transformasi kelemahan, menjadi kekuatan dan segala potensi untuk mendorong perubahan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan yang diformulasikan dalam RPJM Desa Dermaji Tahun 2018-2024 cenderung kurang siap. Hal ini terjadi karena dari ketiga dimensi yaitu; dimensi ekonomi, dimensi ekologi/ lingkungan dan dimensi sosial hanya dimensi ekonomi yang yang cenderung siap. Dua dimensi yaitu dimensi lingkungan dan sosial cenderung kurang siap. Kurang siapnya program diakibatkan karena beberapa permasalahan tiap indikator dan potensi untuk menekan atau menyelesaikan atas permasalahan yang ada. Pemerintah desa telah membuat kebijakan mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat membangun sumber daya manusia belum mampu memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian masyarakat desa dikarenakan faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa. Pembangunan di desa belum memperhatikan aspek sustainability dan lingkungan (*green budgeting*) dikarenakan masalah lingkungan belum menjadi isu strategis dalam penentuan pembangunan di level desa. Kurangnya perhatian Pemerintah Desa dalam melakukan proses pembangunan terhadap ketahanan sosial melalui upaya pembangunan dan transformasi kelemahan, menjadi kekuatan dan segala potensi untuk mendorong perubahan secara berkelanjutan. Kurang siapnya program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa Dermaji Tahun 2018-2024 mengakibatkan kurang maksimalnya upaya penyelesaian permasalahan substansi pembangunan sebagai upaya meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi dan ketahanan sosial di Desa Dermaji. Kurang siapnya program juga berakibat pada rendahnya nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang di peroleh oleh Desa Dermaji yang merupakan tolak ukur capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2003). *Public policy making: An introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Astin Damayanti, Bartoven Vivit Nurdin, Agung Cahyo Nugroho, D. H. (2019). Pengaruh Ketahanan Sosial Masyarakat Desa Wana dalam Ketahanan Identitasnya sebagai Desa Tradisional Astin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2, 163–168.
- Cresswell, J. W. (2015). *Research Design Pendekatann Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. In *Muqarnas* (Vol. 8).
- Creswell, & Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books. In *SAGE Publications, Inc.*
- Dewanta, A. S. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. *Unisia*, 27(53), 325–329. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12>
- Hai, D. . (2016). Process of Public Policy Formulation in Developing Countries. *Public Policy, C*.
- Handoyo, E. (2016). Kebijakan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Belajar dari Kabupaten Tangerang. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan IPTEKS Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Gl*, 441–449.
- Hayat, Hidayat Turohman, S., & Cikusin, Y. (2018). Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 8(2), 147–164.
- Hisyam, D. (2015). Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan. In *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v4i1.3803>
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *KELOLA Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 148–163.
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2022). *Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*. 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.14710/jiip.v>
- Suparmoko, M. (2020). Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Sutikno, C., Wijaya, S. S., & Zaelani, A. (2020). Formulasi Kebijakan Pembangunan Di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 211–227.
- Yudhartha, P. D., & Winaya, I. K. (2018). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1). <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1470>